

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

PROYEK PLTU 10.000 MW

PLN Minta Pengusaha Lokal Beri Jaminan

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuka kesempatan bagi pengusaha lokal untuk ikut serta dalam pembangunan proyek PLTU 10.000 MW. Namun, PLN minta adanya jaminan dalam hal mutu proyek.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTU 10 ribu MW Yogo Pratomo dalam seminar *Financing of the Electrical Power Business and Telecommunication Infrastructure*, di Kantor PLN, Kamis (1/2).

"PLN masih minta diyakinkan oleh industri dalam negeri bahwa kalau mereka diberi kesempatan ini bisa tepat waktu dan sesuai standar," kata Yogo.

Menurut Yogo, industri dalam negeri membutuhkan waktu untuk meyakinkan PLN. Caranya adalah dengan cara duduk bersama untuk memformulasikan apa saja yang bisa dihasilkan dari dalam negeri. "PLN mendukung tapi tidak mau yang dibelinya tidak sesuai standar," katanya.

Yogo mengharapkan industri dalam negeri bisa berpartisipasi dalam penyediaan peralatan listrik dan menjadi *leader* dalam *engineering, procurement and constructions* (EPC). "Karena kalau *leader*-nya sudah dari dalam negeri maka suplai peralatan dipastikan dari dalam negeri," ujar Yogo. Kesiapan dari dalam negeri untuk proyek *crash program*, menurut Yogo, baru sebatas pekerja (*civil work*) dan boiler hingga 50 MW.

Sebelumnya, permintaan Depar-

temen Perindustrian untuk *crash program* adalah pembangkit sampai 8 MW harus memiliki kandungan lokal 68%, pembangkit 8-25 MW sebesar 50%, pembangkit 25-50 MW sebesar 45%, dan pembangkit 50-100 MW memiliki kandungan lokal 40%.

Keringanan Suku Bunga

Sementara itu, Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian (Dep-

"PLN masih minta diyakinkan oleh industri dalam negeri bahwa kalau mereka diberi kesempatan ini, bisa tepat waktu dan sesuai standar,"

● Yogo Pratomo, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTU 10 ribu MW

perin) Ansari Bukhari mengatakan suku bunga domestik yang lebih tinggi dibanding negara lain membuat industri dalam negeri tidak kompetitif. Untuk melancarkan proyek *crash program*, pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi bunga bagi industri dalam negeri yang ikut berpartisipasi.

"Problem utama adalah *financing*

industri dalam negeri. Diusulkan adanya subsidi bunga agar bisa bersaing dengan luar negeri. Nanti akan dilakukan pembicaraan dengan Depkeu," ujar dia.

Subsidi bunga sudah diterapkan di pertanian dan industri tekstil. Menurut Ansari pola serupa juga bisa diterapkan untuk proyek PLTU ini. "Namun, karena terkait APBN harus bicarakan dengan Depkeu, dan nantinya akan masuk dalam anggaran Depkeu. Bulan Juli 2006 sudah ada pengumuman pemenang jadi sebaiknya sudah ada skema pembiayaan yang jelas," tambahnya.

Yogo Pratomo menjelaskan, subsidi bunga diperlukan karena industri dalam negeri meminjam dana dalam rupiah yang bunganya lebih tinggi daripada bunga perusahaan luar negeri.

"Bunga di luar 8%, kalau kita sekitar 12%. Selisihnya kalau tidak dibantu maka industri dalam negeri bisa tidak kompetitif. Nanti dibicarakan dengan Depkeu supaya ada subsidi bunga," kata Yogo.

Dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan, bila produsen dalam negeri bersaing dengan produsen luar negeri, diperbolehkan harga 15% lebih mahal dari produksi luar negeri.

"Nanti ada pembahasan lagi dengan kalangan industri, kita formulasikan lagi berapa kesanggupan industri dalam negeri. Subsidi bunga mungkin dibutuhkan 4-5 persen supaya bisa bersaing dan dibebankan ke APBN," jelas Yogo. (es)

miliar per hari. Tak heran jika PLN Sumut merugi hingga Rp 3,4 triliun pada tahun 2006.

Menurut Deputy Manajer Komunikasi dan Hukum PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Marodjahan Batubara, inilah yang menyebabkan hampir semua pembangkit (73,54 persen) menjadi boros dan tidak efisien. Ironisnya, itu terjadi karena ketidakmampuan perusahaan lain.

Menurut Marodjahan, untuk menghasilkan satu Kwh (*kilowatt hour*) daya listrik diperlukan Rp 1.400. Ini jika harga solar Rp 6.500 per liter dan rasio penggunaan solar (*specific fuel consumptions*) 0,27 liter per Kwh.

"Itu baru komponen biaya bahan bakar," kata Marodjahan. Padahal, masih ada biaya pemeliharaan, biaya akumulasi penyusutan, biaya SDM (sumber daya manusia), dan biaya umum.

Sementara itu, harga jual listrik rata-rata PLN ke konsumen sesuai tarif dasar listrik (TDL) adalah Rp 600 per Kwh. Untuk konsumen rumah tangga, harga jual paling mahal Rp 713 per Kwh. Dengan demikian, sangat wajar kalau PLN di Sumut saja merugi hingga Rp 3,4 triliun.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, menurut Marodjahan, sebenarnya bukan soal sulit. Syaratnya, PLN harus mempunyai pembangkit yang bisa memproduksi listrik dengan biaya murah, yakni PLTA. "Biaya produksi listrik PLTA hanya Rp 200 per Kwh," katanya.

PLN untung

Dalam hitungan Manajer Perencanaan PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut-Aceh-Riau, Bistok HM Nanggolan, jika seluruh pembangkit di Sumut diganti PLTA, PLN bisa menghemat Rp 63 miliar per hari.

PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut-Aceh-Riau sendiri telah mengidentifikasi 63 lokasi yang bisa dibangun PLTA. Namun, sampai saat ini baru listrik dari PLTA Renun dan PLTA Sipansihaporas yang listriknya sudah bisa dinikmati masyarakat Sumut. Sungguh tidak sebanding dengan potensi besar di beberapa wilayah Sumut.

Padahal, dari daerah aliran sungai (DAS) Asahan saja mestinya bisa dibangun lima PLTA berkapasitas total lebih dari 1.200 MW. Belum DAS sungai-sungai besar lain, seperti DAS Sungai Wampu yang mampu menghasilkan lebih dari 400 MW atau DAS Batang Toru yang bisa menghasilkan 200 MW lebih.

Kalau semua potensi air di sungai-sungai besar dioptimalkan, niscaya Sumbagut tidak akan kekurangan listrik.

Ironis

Di aat negara-negara besar, seperti China, Brasil, dan Amerika Serikat, sibuk membangun bendungan besar untuk PLTA, Indonesia malah sibuk dengan rencana membangun PLTU berbahan bakar batu bara.

Sekadar contoh, belum lama ini pemerintah menawarkan ke pihak swasta proyek pembangkit berbahan bakar batu bara hingga 10.000 MW guna mengatasi krisis listrik di beberapa wilayah.

PLTA yang merupakan penghasil energi listrik dengan biaya produksi paling murah malah jarang dilirik. Memang, biaya membangun PLTA lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain. Akan tetapi, kalau dilihat kebutuhan jangka panjang, mestinya pembangunan PLTA tetap harus jadi prioritas.

Harga batu bara saat ini memang relatif murah. "Namun, siapa bisa menjamin harga ini akan semurah saat ini jika kebutuhan semakin tinggi dengan berdirinya banyak PLTU," ujar Bistok.

Padahal, PLTA juga akan menguntungkan dari sisi pengendalian banjir dan pemanfaatan untuk irigasi.

Wajar kalau kemudian banyak pihak bertanya apakah tidak ada kepentingan lain di balik rencana pembangunan pembangkit 10.000 MW berbahan bakar batu bara? Kepentingan itu mungkin saja belum terlihat sekarang, tetapi akan sangat jelas setelah harga batu bara melambung jika banyak PLTU terbangun.

Bukankah dulu tak pernah ada yang mempermasalahkan pembangunan PLTD karena harga minyak saat itu sangat murah. Sekarang, rakyatlah yang harus menanggung harga listrik mahal, sementara PLN juga tak bisa berkutik?

Untunglah dalam rencana pembangunan pembangkit di sistem kelistrikan Sumut-Aceh tahun 2005-2015 masih terdapat 10 PLTA yang masuk dalam skema rencana. Dua di antaranya sudah terbangun, yakni Renun dan Sipansihaporas. PLTA lainnya masih dalam status *on going project* (pembangunan masih berlangsung), yakni PLTA Peusangan I dan II di Aceh berkapasitas 86 MW yang direncanakan selesai tahun 2012. Dua PLTA dalam status *committed project* (baru berupa komitmen), yakni Asahan III (154 MW) yang direncanakan selesai tahun 2011 dan Asahan I (180 MW) yang direncanakan selesai 2010.

PLTA lainnya masih dalam rencana, yakni Asahan IV (80 MW), Asahan V (18 MW), Tampur Langsa (428 MW), Wampu (107 MW), dan Raison Sibolga (98 MW).

Jika rencana ini bisa terselesaikan sesuai target, PLN tak perlu lagi mengeluhkan mahalnnya biaya produksi listrik.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 63

TAHUN 2007

Kapal Nasional Minta Dukungan Perusahaan Listrik

JAKARTA — Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) meminta PT PLN dan perusahaan listrik swasta menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk mengangkut batu bara, bahan bakar pembangkit listrik.

Tanpa dukungan konsumen terbesar batu bara itu, menurut Ketua Umum INSA Oentoro Surya, larangan kapal asing mengangkut batu bara untuk kepentingan dalam negeri mulai 2010 sulit terlaksana. "Kapal kami sangat sedikit, sementara produksi batu bara banyak," katanya kemarin di sela-sela acara diskusi INSA di Hotel Borobudur, Jakarta.

Sesuai dengan *road map* dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, pengangkutan batu bara dalam negeri oleh kapal asing berangsur-angsur akan dikurangi, sehingga pada 2010 hanya kapal nasional yang diperbolehkan melakukannya.

Oentoro menjelaskan, dalam setahun, batu bara yang harus diangkut untuk dalam negeri, terutama untuk keperluan listrik, sebanyak 3,75 juta ton atau 25 persen dari total produksi batu bara. Kapal Indonesia yang mampu mengangkut batu bara hanya delapan unit dengan kapasitas 65 ribu batu bara dari kebutuhan 28 kapal per bulan.

"Dalam sebulan, kapal hanya jalan dua kali," ucapnya. Ini pun, ia melanjutkan, perhitungan sekarang, yang belum melihat pertumbuhan produksi batu bara 8 persen per tahun. Itu sebabnya, ia menginginkan dukungan dari konsumen batu bara dalam negeri dalam bentuk kerja sama pengadaan kapal.

Pengadaan kapal bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*). "Teknisnya gampang, seperti perusahaan yang membeli mobil untuk transportasi karyawannya itu, lo," ujarnya.

Apalagi, menurut Oentoro, penggunaan kapal Indonesia sangat menguntungkan karena biayanya lebih murah dan bisa mendorong perekonomian secara keseluruhan. ● HARUN MAHBUB

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

63% Warga Kalteng tak dapat listrik

PALANGKARAYA: Sebanyak 376.470 rumah tangga atau 63% penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah hingga kini masih belum dapat menikmati aliran listrik.

"Selain minimnya pasokan listrik dari PLN, hal itu juga disebabkan sebaran penduduk di Kalteng yang begitu luas tak memungkinkan dijangkau jaringan listrik," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng Halind Ardi di Palangka Raya, kemarin.

Dari total 600.899 rumah tangga yang ada di Kalimantan Tengah, tercatat baru sebanyak 224.429 rumah tangga yang telah mempunyai listrik di rumahnya. Artinya ratio elektrifikasi Kalteng masih sangat rendah hanya sekitar 37,2%.

Selama ini, jangkauan jaringan listrik baik tegangan menengah maupun rendah masih sangat terbatas di wilayah-wilayah perkotaan. Itupun dengan keterbatasan daya yang tidak mencukupi kebutuhan listrik setempat.

Sehingga, sulit bagi provinsi itu bila hanya berharap pada PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasinya hingga 90% pada 2015 sesuai target secara nasional.

"Untuk mencapai target tersebut, sedikitnya dibutuhkan daya listrik sebesar 170 megawatt dengan jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah yang memadai." (ANTARA)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2007

PLTA ASAHAN III

Siapa yang Menunda Proyeknya?

PLTA Asahan III hanya salah satu dari pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dari Sungai Asahan. Potensi besar daerah aliran sungai atau DAS Asahan menghasilkan energi listrik bisa dilihat dari lima lokasi proyek PLTA di sepanjang aliran sungai ini.

Sedikitnya 1.200 megawatt (MW) daya listrik dihasilkan jika lima PLTA bisa dibangun di DAS Asahan. Potensi besar ini justru dinikmati pertama kali oleh konsorsium pengusaha Jepang yang mendirikan pabrik pengolahan aluminium di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan.

Untuk mengoperasikan pabrik pengolahan aluminium itu PT Inalum membangun dua pembangkit besar, yakni PLTA Siguragura dan PLTA Tangga dengan memanfaatkan air DAS Asahan.

Potensi besar inilah yang membuat investor listrik swasta juga tertarik membangun PLTA di DAS Asahan. Salah satunya PT Bajradaya Sentranusa yang akan membangun PLTA Asahan I. PLTA Asahan I yang dikerjakan PT Bajradaya ini terletak paling hulu.

Sejak tahun 1972, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah tertarik mengembangkan PLTA Asahan III, seperti tertuang dalam konsep "Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik secara Menyeluruh di Danau Toba dan Wilayah Sungai Asahan". PLTA Asahan III rencananya berkapasitas 154 MW.

Isu lingkungan

Untuk mewujudkan gagasan ini, dilakukan studi kelayakan dan perencanaan detail desain secara berturut-turut pada tahun 1981-1982 dan 1984-1988. Studi dilakukan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency), sedangkan detail desain dengan tipe bendungan dikerjakan perusahaan konsultan yang juga berasal dari Jepang,

Nippon Koei.

Tahun 1995, PLN melaksanakan studi analisa dampak lingkungan (amdal), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang sudah disetujui Komisi Departemen Pertambangan dan Energi melalui surat keputusan tertanggal 8 Juni 1995. Namun, seperti yang diakui PLN, pada desain awal terdapat isu lingkungan, seperti pengurangan lahan produktif seluas 2,4 km², pemindahan 110 keluarga, relokasi transmisi milik PT Inalum, pengalihan jalan umum sepanjang tiga kilometer, dan dana proyek yang terlalu tinggi.



Persoalan ini kami serahkan ke pemerintah pusat untuk memilih siapa yang berhak membangun PLTA Asahan III.

RE Nainggolan

Karena isu lingkungan dan dana yang dibutuhkan terlalu tinggi untuk tipe bendungan, proyek pembangunan PLTA Asahan III akhirnya dihentikan.

Baru pada tahun 2004 dilakukan lagi studi kelayakan, bukan lagi dengan tipe bendungan, melainkan tipe *Run off River*. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 12 Agustus 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memasukkan PLTA Asahan III dalam daftar calon proyek jangka pendek untuk JBIC (Japan Bank for International Cooperation) ke Dubes Jepang, Nippon Koei kemudian melakukan peninjauan kembali desain untuk mengurangi isu lingkungan.

Akhirnya di bulan November 2004, Gubernur Sumatera Utara menyetujui amdal proyek PLTA Asahan III.

Namun, sejak itu, PLN tak kunjung mendapatkan kepastian pendanaan pembangunan proyek PLTA Asahan III. Di saat bersamaan, krisis listrik di wilayah Sumut memasuki tahap yang cukup parah. Pemerintah Provinsi Sumut pun tak menolak tawaran PT Mega Power, perusahaan yang dimiliki Ahmad Kalla untuk membangun PLTA Asahan III. Tahun 2005 izin prinsip untuk PT Mega Power pun dikeluarkan Gubernur (saat itu) Tengku Rizal Nurdin.

Hanya saja, pada Maret 2005 PLN mendapatkan kepastian pinjaman dari JBIC senilai 864 juta yen atau setara Rp 69,12 miliar untuk jasa konsultan detail desain PLTA, dan pinjaman 27,6 miliar yen atau setara Rp 2,2 triliun untuk pelaksanaan konstruksi PLTA Asahan III.

Izin lokasi

Menurut General Manager PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut-Aceh-Riau Indra Pribadi, detik ini juga PLN sudah siap membangun proyek PLTA Asahan III. Namun, langkah PLN masih tertahan.

Pemprov Sumut belum mengeluarkan izin lokasi untuk pembangunan PLTA Asahan III oleh PLN. Alasannya, Pemprov Sumut juga mengizinkan PT Mega Power membangun PLTA Asahan III. Gara-gara belum keluarnya izin lokasi dari Pemprov Sumut inilah, nasib proyek pembangunan PLTA Asahan III terkatung-katung.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut RE Nainggolan menuturkan, persoalan ini sekarang diserahkan ke pemerintah pusat untuk menentukan siapa yang berhak membangun PLTA Asahan III.

Nainggolan membantah jika

dikatakan pemprov menghambat proyek PLTA Asahan III. Pemprov Sumut, katanya, telah mengeluarkan izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan bagi PT Mega Power. Izin ini dikeluarkan saat kejelasan proyek pembangunan PLTA Asahan III oleh PLN belum menemukan titik terang.

"Kami tidak menghambat. Desain dari kedua belah pihak (PLN dan PT Mega Power) kami serahkan semuanya, biar pemerintah pusat yang menentukan," kata Nainggolan.

Menurut Manajer Perencanaan PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut-Aceh-Riau Bistok HM Nainggolan, sebenarnya secara teknis PLN yang paling siap membangun PLTA Asahan III. Selain dana sudah tersedia, desain yang dimiliki PLN sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTA berkapasitas lebih dari 100 MW.

Detail desain yang dimiliki PLN dikerjakan konsultan berpengalaman internasional dalam pengerjaan proyek-proyek pembangkit listrik besar.

Pembangunan PLTA Asahan III dalam rencana PLN dapat diselesaikan 2011. Namun, jika melihat perebutan kepentingan di balik siapa yang bakal membangun PLTA Asahan III, masyarakat Sumut yang sudah lama didera krisis listrik tak bisa banyak berharap.

Bukan apa-apa, jika ada jaminan ketersediaan debit air seperti di DAS Asahan, PLTA adalah pembangkit paling menguntungkan bagi siapa pun operatornya. Biaya produksi yang dikeluarkan cukup murah, hanya Rp 200 per Kwh, sedang harga jual ke distributor (PLN) masih sangat menguntungkan, Rp 600 per Kwh. Jika PLN yang berhasil menjadi pemilik proyek PLTA Asahan III, tentu keuntungan ini bisa digunakan menutup kerugian mereka selama ini. (BIL)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 11

TAHUN 200

Listrik di Pulau Tidung Padam Sejak Tiga Bulan

JAKARTA - Sudah tiga bulan aliran listrik di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu padam karena pembangkit listrik tenaga diesel (genset) rusak berat. Akibatnya, aktivitas warga kepulauan itu terganggu.

Selama ini, sekitar 5.000 jiwa penduduk Pulau Tidung mengandalkan lima genset. Namun, dua genset saat ini rusak sedangkan tiga genset sudah tidak maksimal karena sudah uzur.

"Kami sempat berusaha memperbaiki sekadarnya, tapi sekarang tidak berfungsi lagi," kata Bestari Darus, salah seorang dari 15 perwakilan penduduk Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, usai me-

ngadu di Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (1/2).

Menurut dia, kedatangannya ke DPRD DKI, kemarin, untuk meminta anggota Dewan dan Pemerintah Provinsi DKI membeli genset baru di pulau tersebut.

Sebelumnya, saat menemui warga, anggota Komisi D DPRD DKI Abdul Ghoni mengatakan, pihaknya berjanji akan menyampaikan kondisi dan aspirasi warga Pulau Tidung ke pimpinan DPRD DKI.

"Kami nanti akan meminta agar ketua DPRD DKI mendesak Pemprov DKI segera mengupayakan ketersediaan aliran listrik yang memadai. Tidak hanya di Pulau

Tidung, tapi juga di semua pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu," kata politisi dari PAN itu.

Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi A (Pemerintahan) DPRD DKI Prya Ramadhani. "Sebelum ada realisasi kabel bawah laut, seharusnya Pemprov DKI sudah memikirkan langkah antisipasinya," kata politisi dari Partai Golkar tersebut.

Dia pun mendesak agar Pemprov DKI segera memperbaiki lima genset yang ada di Pulau Tidung untuk sementara waktu, paling lama pekan depan. "Jika tidak, hal ini menjadi penilaian kami bahwa eksekutif tidak serius," ujar Prya. (jau)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 15												TAHUN 2007																		

Kadin China Lanjutkan Dukungan Proyek Kelistrikan PLN

JAKARTA (SINDO) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China bidang mesin listrik akhirnya menegaskan dukungan pada Chengda Engineering dan Sinomech untuk kesertaannya di proyek 10 ribu MW pada PLTU Indramayu, dan PLTU Tanjung AwarAwar. Kepastian itu diperoleh setelah direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) melakukan kunjungan kerja ke Beijing.

Berdasarkan keterangan tertulis PLN yang diterima SINDO kemarin, pejabat tinggi Badan Perdagangan dan Komersial China menegaskan dukungan penuh pemerintah RRC pada *crash program* 10 ribu MW, baik dari segi peralatan maupun pendanaan. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan delegasi China, yaitu delegasi pendanaan (SINOSURE dan perbankan) pada 22 Januari 2007 dan delegasi Kadin China pada 24 Januari 2007.

Hasil dari pertemuan dengan delegasi pendanaan menegaskan bahwa pemerintah China memegang komitmen terdahulu untuk mendukung *crash program*, meliputi kesiapan pendanaan dan kontraktor. Hal yang sama disampaikan pejabat senior Kadin China bahwa pihaknya mendukung, bahkan menjanjikan bantuan konsultasi agar proyek dapat selesai tepat atau lebih cepat dari jadwal. (faizal joenoes)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2007

KELISTRIKAN

Kontraktor Lokal Dapat Subsidi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mengakomodasi usulan subsidi bunga pinjaman yang diajukan para kontraktor lokal yang ikut dalam proyek percepatan kelistrikan.

Langkah itu dilakukan agar perusahaan lokal bisa bersaing dengan kontraktor dari luar negeri. Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari, Kamis (1/2), mengemukakan, kontraktor lokal mengusulkan agar sebagian subsidi listrik bisa dipakai untuk subsidi bunga pinjaman industri dalam negeri.

"Ini salah satu alternatif pembiayaan yang diusulkan. Sebab, pinjaman bunga dari perbankan luar negeri itu kurang dari 8 persen, sementara kalau meminjam dari perbankan di dalam negeri bisa sampai 14 persen. Akibatnya, kontraktor lokal akan sulit bersaing dengan kontraktor asing," ujar Ansari.

Menurut dia, bentuk subsidi serupa juga sudah diterapkan di sektor pertanian, industri tekstil, dan biofuel.

Menindaklanjuti keinginan para pengusaha, Departemen Perindustrian segera membentuk tim kecil untuk merumuskan usulan subsidi bunga pinjaman untuk disampaikan ke Departemen Keuangan.

Pemerintah memprioritaskan kontraktor dalam negeri untuk membangun proyek pembangkit 10.000 megawatt di luar Jawa.

Pemasukan proposal untuk lelang proyek itu dimulai 6 Februari, sementara pengumuman pemenang dijadwalkan Juli 2007.

PT Perusahaan Listrik Negara juga sedang mengupayakan bentuk pembiayaan melalui perbankan nasional. Sampai saat ini skema pendanaan belum jelas juga.

Ketua Harian Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Berbahan Bakar Batu Bara Yogo Pratomo mengatakan, PLN dan industri dalam negeri segera bertemu untuk memastikan kemampuan kontraktor lokal dalam membangun pembangkit. (DOT)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

KONTRAKTOR PEMBANGKIT

Diusulkan Dapat Subsidi Bunga

JAKARTA (SINDO) – Kalangan industri mengusulkan adanya subsidi bunga bagi kontraktor pembangkit listrik lokal agar bisa bersaing dengan kontraktor asing. Saat ini, kontraktor lokal masih kesulitan mendapatkan pendanaan yang kompetitif dibandingkan kontraktor asing.

“Untuk mengatasi kendala itulah ada usulan kontraktor lokal diberi subsidi bunga. Usulan tersebut akan disampaikan ke Departemen Keuangan untuk pembahasan lebih lanjut,” kata Dirjen Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian Anshari Bukhari di sela-sela seminar pendanaan kelistrikan di Kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) Jakarta, kemarin.

Anshari mengatakan, skema subsidi bunga untuk usaha kelistrikan itu nantinya bisa meniru subsidi di bidang pertanian, industri tekstil maupun pengembangan bahan bakar nabati. Anggaran subsidi bunga, lanjut dia, bisa dibebankan langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagaimanapun, lanjut dia, skema pendanaan untuk kontraktor lokal yang lebih murah, baik dengan subsidi ataupun alternatif lain, memang harus segera ditetapkan.

Anshari mengatakan, pendanaan itu dibutuhkan para kontraktor lokal agar dapat bersaing dalam lelang program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10 ribu megawatt (MW) yang mulai berjalan.



SUBSIDI: Guna meningkatkan daya saing, Departemen Perindustrian mengusulkan subsidi bunga bagi kontraktor pembangkit listrik lokal. Kontraktor lokal sulit bersaing karena pendanaan yang kurang kompetitif dibandingkan kontraktor asing.

“Lelang yang untuk luar Jawa sudah mulai dan Juli mendatang pengumuman pemenang. Jadi, sebelum bulan itu seharusnya sudah ada skema pembiayaan yang jelas,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 10 Ribu MW Yogo Pratomo mengatakan, pemerintah telah memfasilitasi pendanaan dalam negeri untuk pembangunan pembangkit di Luar Jawa. Untuk merealisasikannya, kata dia, Bank BNI telah ditunjuk sebagai bank utama pendanaan.

Namun, Yogo mengakui bahwa relatif tingginya suku bunga kredit di Indonesia membuat pengadaan barang dan peralatan kelistrikan oleh kontraktor lokal menjadi mahal. Karena itu, lanjut dia, jika subsidi bunga bisa didapatkan, hal itu akan mendorong meningkatnya partisipasi yang lebih besar

dari para kontraktor kelistrikan dalam negeri.

“Bunga di luar 8%, kita sekitar 12%. Subsidi bunga mungkin dibutuhkan sekitar 4-5% supaya mereka bisa bersaing,” ujarnya. Meski mendukung, dia mengingatkan bahwa dalam hal ini akan ada persoalan karena pemberian subsidi bunga akan membebani APBN. Karena itu, kata dia, belum tentu usulan ini dapat disetujui Menteri Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim mengatakan, proses prakualifikasi peserta lelang 25 pembangkit yang berlokasi di luar Jawa dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit berkapasitas total 10 ribu MW sudah selesai. Namun, imbuh dia, saat ini Dewan Direksi PLN belum menerima laporan resmi dari tim lelang. (ahmad senoadi)